

## Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi

Dedi Epriadi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Putera Batam, Jalan R. Soeprapto, Muka Kuning, Batam 29439, Indonesia

### INFORMASI ARTIKEL

#### Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 15 Juli 2020

Revisi Akhir: 5 Agustus 2020

Diterbitkan Online: 22 Agustus 2020

### KATA KUNCI

Evaluasi, Pelaksanaan Tugas, Pendidikan

### KORESPONDENSI

No HP: 0822 8375 035

E-mail: [dedi.epriadi@puterabatam.ac.id](mailto:dedi.epriadi@puterabatam.ac.id)

### A B S T R A C T

This research was conducted due to several problems, including: weak annual work program planning, weak program control, this research was conducted on 60 people involved in the Technical Implementation Unit in Rantau Pandan using the survey method with a descriptive qualitative approach with the aim of knowing how far. where is the implementation of the Technical Service Unit of the Rantau Pandan District Education Office. The results obtained: the duties and functions have not been carried out optimally, in providing direction it is quite good, there is still a lack of supervision carried out and from the results above there are several conditions that cause this to occur including the skill factor and the employee discipline factor.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kabupaten Bungo. Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kabupaten Bungo yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Rantau Pandan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan adalah penyelenggara sebagian tugas Dinas Pendidikan di Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

Uraian tugasnya yaitu membuat rencana dan program kerja, melaksanakan koordinasi dan bimbingan

pelaksanaan teknis peningkatan mutu pendidikan, mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi pencapaian target kurikulum, mengumpulkan dan mengelola data sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar (TK, SD dan SMP), membuat laporan hasil pelaksanaan dibidangnya Kepala Dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sesuai dengan bidangnya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan tugas pokok, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi dalam penataan Prasekolah dan pendidikan Dasar (TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs), penyusun laporan, pengkoordinasian bidang pendidikan menengah (SMA, MA/SMK), pelaksanaan

K3, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pendidikan dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya dinilai belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa belum dibuatnya rancangan program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan, pelaksanaan pengkoordinasian bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan pertama, di Kecamatan Rantau Pandan terdapat 36 (tiga puluh enam) yang terdiri dari SD berjumlah 24 dan untuk SLTP berjumlah 12. pelaksanaan K3 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib. Serta masih kurangnya pelaksanaan pengendalian program dan pengawasan serta evaluasi pendidikan yang ada di Kecamatan Rantau Pandan.

Secara khusus, pada saat penulis melakukan pra penelitian, permasalahan dalam bidang pelaksanaan tugas yang dapat dijadikan fenomena diantaranya :

1. Masih ditemukannya kelemahan dalam pembuatan rancangan program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan. Hal ini dapat dilihat dari program kerja tahunan yang belum begitu terlaksana.
2. Masih ditemukannya kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian program dan pengawasan serta evaluasi pendidikan yang ada di Kabupaten Bungo. Kondisi ini mempengaruhi upaya peningkatan profesionalisme kinerja pegawai dilingkungan organisasi.
3. Masih ditemukannya kelemahan dalam Pelaksanaan K3. Sehingga berpengaruh terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Analisis pelaksanaan evaluasi pembelajaran Biologi kelas x semester genap 2013/2014 Di SMAN Kota**

**Blitar, Umi Hasanah, Triastono Imam Parasetyo dan Betty Lukiati.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran biologi kelas X di SMA 1, 2 dan 4 Blitar dan kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan guru, angket pada siswa, dan dokumen berupa photo dan RPP lengkap dengan instrument penilaian, soal dan tugas siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SMS 1 Kota Blitar sudah sesuai kurikulum 2013, namun untuk penilaian portofolio dan proyek belum ada instrumennya. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan di SMA N 2 sesuai kurikulum 2013 adalah penilaian sikap dengan observasi, penilaian tes praktek dan tes tulis, namun untuk penilaian yang sudah dilakukan belum dilengkapi dengan instrument penilaian. Penilaian yang sudah dilakukan sesuai kurikulum di SMA N 4 Blitar adalah penilaian sikap dengan observasi, penilaian tes tulis, portofolio, tes praktek dan proyek, namun untuk penilaian portofolio dan proyek belum ada instrumennya. (2) kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran sesuai kurikulum kurikulum 2013 adalah pelaksanaan penilaian sikap, di SMA N 1 dan di SMA N 2 karena keterbatasan waktu dan di SMA N 4 karena jumlah siswa yang cukup banyak dalam satu kelas, yaitu 40 siswa. Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah guru diharapkan melengkapi instrument penilaian yang belum ada.

Ndraha (2000:79) berpendapat bahwa pemerintah mengemban dua fungsi pelayanan dan pemberdayaan. Kedua fungsi ini menurut Ndraha (2000:78) terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder: pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak di privatisasi termasuk jasa hankam, dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Pemerintah sekunder berfungsi sebagai provider kebutuhan dan

tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Evaluasi menurut Ndraha (2003:201), menyatakan bahwa evaluasi adalah “perbandingan sebelum dan sesudah suatu tindakan dengan beberapa indicator diantaranya: memberikan arahan, mengawasi pelaksanaan dan pendataan jumlah sarana dan prasarana.”

Ndraha (2000:79) berpendapat bahwa pemerintah mengemban dua fungsi pelayanan dan pemberdayaan. Kedua fungsi ini menurut Ndraha (2000:78) terdiri dari fungsi primer dan fungsi sekunder: pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa public yang tidak di privatisasi termasuk jasa hankam, dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Pemerintah sekunder berfungsi sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu dipenuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Evaluasi menurut Ndraha (2003:201), menyatakan bahwa evaluasi adalah “perbandingan sebelum dan sesudah suatu tindakan dengan beberapa indicator diantaranya: memberikan arahan, mengawasi pelaksanaan dan pendataan jumlah sarana dan prasarana.”

Evaluasi menurut Nazara dalam Bappenas (2007 : 8), menyatakan bahwa evaluasi berfungsi untuk melihat dampak dengan mengisolasi efek dari suatu intervensi. Pada pelaksanaan evaluasi memerlukan data dan metodologi yang lebih kompleks dan monitoring. Evaluasi sendiri dapat berupa dampak apakah program mencapai tujuan awal, proses bagaimana program dilaksanakan dan apa saja keuntungan yang diterima oleh peserta atau juga analisis biaya dari program itu sendiri.

Evaluasi menurut Suharyadi (2007 : 80), adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.

### 3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode survey dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Jumlah sampel sebanyak 60 orang, antara lain kepala UPT sebanyak 1 orang, Staff UPT sebanyak 16 orang serta kepala sekolah sebanyak 43 orang. Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan beberapa pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan kuesioner.

Tahap-tahap pengolahan data dilakukan sebagai berikut : Editing, Melakukan Perhitungan, Tabulating.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.**

Dalam pelaksanaan tugas di wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo membentuk Unit Pelayanan Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kabupaten Bungo. Salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kabupaten Bungo yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Rantau Pandan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan adalah penyelenggara sebagian tugas Dinas Pendidikan di Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

Uraian tugasnya yaitu membuat rencana dan program kerja, melaksanakan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan teknis peningkatan mutu pendidikan, mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi pencapaian target kurikulum, mengumpulkan dan mengelola data sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar (TK, SD dan SMP), membuat laporan hasil pelaksanaan dibidangnya Kepala Dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sesuai dengan bidangnya.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan tugas pokok, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) berfungsi dalam penataan Prasekolah dan pendidikan Dasar (TK/RA, SD/MI, SLTP/MTs), penyusun laporan, pengkoordinasian bidang pendidikan menengah (SMA, MA/SMK), pelaksanaan K3, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pendidikan dan pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya dinilai belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa belum dibuatnya rancangan program kerja tahunan yang dilaksanakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan, pelaksanaan pengkoordinasian bidang pendidikan dasar, bidang pendidikan pertama, di Kecamatan Rantau Pandan terdapat 36 (tiga puluh enam) yang terdiri dari SD berjumlah 24 dan untuk SLTP berjumlah 12. pelaksanaan K3 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib. Serta masih kurangnya pelaksanaan pengendalian program dan pengawasan serta evaluasi pendidikan yang ada di Kecamatan Rantau Pandan.

Dalam pelaksanaan penelitian dapat dianalisa bahwa evaluasi pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah

peneliti tetapkan untuk dianalisis, lebih jelasnya setiap indikator dapat dilihat dibawah ini:

#### **Memberikan Arahan Terhadap Kurikulum Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar**

Memberikan arahan di dalam organisasi sangat penting dan harus dilakukan karena pemberian arahan ialah merupakan suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan arahan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan tertentu yang telah ditugaskan kepadanya.

Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan memberikan arahan terhadap kurikulum pra sekolah berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ditetapkan.

Dalam pelaksanaan penelitian dapat dilihat bahwa dalam mengumpulkan pihak kepala sekolah dan menyampaikan kurikulum yang berlaku di Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan cukup baik sehingga sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dapat dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan saran atau masukan dari Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan cukup baik dan dalam memberikan arahan terhadap kurikulum dapat berjalan dengan cukup baik serta dalam memberikan arahan permasalahan kurikulum dapat diatasi dengan baik. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat hasil angket yang disebarkan kepada responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan data yang didapatkan, maka dapat dilihat bahwa jawaban responden mengemukakan bahwa dengan kategori sangat baik berjumlah 20 dengan rata-rata 10 dengan persentase 17. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam mengumpulkan pihak kepala sekolah dan menyampaikan kurikulum yang berlaku di Kabupaten Bungo dapat

dilaksanakan dengan baik dan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dapat dilakukan dengan sangat baik.

Sementara untuk jawaban baik dinilai dengan jumlah 39 dengan rata-rata 20 dengan persentase 33%. Dapat dilihat bahwa dalam mengumpulkan pihak kepala sekolah berjalan baik dan menyampaikan kurikulum yang berlaku di Kabupaten Bungo baik dan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan baik.

Untuk kategori jawaban cukup baik berjumlah 52 dengan rata-rata 26 dengan persentase 43%. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam mengumpulkan pihak kepala sekolah dan menyampaikan kurikulum yang berlaku di Kabupaten Bungo dinilai masih ada yang belum memenuhi undangan dan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dinilai sudah cukup baik.

Sementara itu dapat dilihat dengan kategori kurang baik hanya dinilai dengan jumlah 9 dengan rata-rata 4 dengan persentase 7% dengan alasan bahwa dalam mengumpulkan pihak kepala sekolah dan menyampaikan kurikulum yang berlaku di Kabupaten Bungo dinilai kurang baik dan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dinilai belum berfungsi dan perlu ditingkatkan.

Dari data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator memberikan arahan terhadap kurikulum pra sekolah dan pendidikan dasar yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dikategorikan cukup baik. Artinya disini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo sudah mampu memberikan arahan yang cukup baik kepada kepala sekolah-kepala sekolah terhadap kurikulum pra sekolah dan pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan arahan kepada kepala sekolah-kepala sekolah sudah berjalan dengan cukup baik, maka dari itu penulis dapat mengambil suatu kesimpulannya bahwa unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dalam memberikan arahan kepada pihak kepala sekolah terhadap kurikulum pra sekolah dan pendidikan dasar yang berlaku di Kabupaten Bungo sudah berjalan cukup baik, walaupun masih banyak hal yang masih perlu ditingkatkan kedepannya untuk perkembangan mutu sekolah yang ada di Kabupaten Bungo.

Untuk indikator ini diperkuat lagi berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah seorang kepala sekolah di Kabupaten Bungo beliau mengatakan bahwa unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan arahan terhadap kurikulum pra sekolah dan pendidikan dasar dapat berjalan dengan cukup baik dan memberikan arahan permasalahan kurikulum pun dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik dan dapat dimengerti dengan baik.

Berdasarkan uraian data, hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis maka penulis menyimpulkan bahwasannya pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Pandan dalam memberikan arahan kurikulum pra sekolah dan pendidikan dasar sudah cukup, baik dan bisa membantu sekolah dalam mengembangkan mutu sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bungo.

### **Mengawasi Pelaksanaan Pengajaran Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar**

Pengawasan secara teori pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan

penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan/kegiatan itu dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Pembukuan dan Verifikasi serta mengawasi pelaksanaan pengajaran pra sekolah dan pendidikan dasar, agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan penelitian dapat dilihat bahwa dalam melakukan kunjungan langsung atau tidak langsung dan meninjau perkembangan sekolah dapat dilaksanakan dengan cukup baik serta pada setiap semester para sekolah dan pendidikan dasar meliputi menerima laporan persemester dari sekolah mengenai jumlah sekolah, jumlah siswa dan perkembangan tenaga pengajar telah berjalan dengan cukup baik dan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan langsung mendatangi sekolah dapat berjalan dengan cukup baik. Sehingga hasil pengawasan yang dilakukan dapat diberikan arahan dengan cukup baik.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan dapat diselesaikan dengan cukup baik. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat hasil angket yang disebarkan kepada responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di beberapa sekolah dasar terlihat ada pengawasan yang

dilakukan oleh pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Rantau Pandan dalam pelaksanaan pengajaran pra sekolah dan pendidikan dasar, pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Pada saat ujian semester para sekolah dan pendidikan dasar diawasi oleh langsung Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan dengan tujuan untuk melihat ketertiban jalannya proses pelaksanaan ujian yang diselenggarakan, dan juga persemester jumlah siswa dan perkembangan tenaga pengajar selalu dilakukan pengawasan, seperti apakah kurang tenaga pengajarnya atau tidak.

Untuk indikator ini diperkuat dari hasil wawancara penulis dengan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan beliau mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan di dalam mengawasi pelaksanaan pengajaran pra sekolah dan pendidikan dasar yang dilakukan oleh pihak kami sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tugas, fungsi dan program yang kami buat, pengawasan yang kami lakukan itu untuk melihat bagaimana perkembangan sekolah setelah diberi arahan terhadap kurikulum pra sekolah dan pendidikan dasar yang telah disampaikan.

#### **Mendata Jumlah Sarana dan Prasarana Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar**

Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan dan mendata jumlah sarana dan prasarana pra sekolah dan pendidikan dasar bertugas bahwa dalam menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan berdasarkan hasil yang telah Dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karir, Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya, mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan

informasi, menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis, menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah, memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Program dan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya, membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Bina program, baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan penelitian dapat dilihat bahwa dalam meninjau langsung atau tidak langsung dalam memperhatikan sarana dan prasarana sekolah dapat berjalan dengan cukup baik sehingga dalam mengajukan bersama-sama dengan Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo dapat dilaksanakan dengan cukup baik dan penerimaan laporan sarana dan prasarana dapat ditanggapi dengan cukup baik.

Pemenuhan saran atas pemenuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi dengan baik serta dalam menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana dapat diselesaikan dengan cukup baik. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat hasil angket yang disebarakan kepada responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dari data yang di olah peneliti, maka dapat dikatakan bahwa untuk indikator mendata jumlah sarana dan prasarana pra sekolah dan pendidikan dasar yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dalam melakukan tugasnya meninjau langsung atau tidak langsung dalam memperhatikan sarana dan prasarana sekolah sudah berjalan cukup baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di beberapa sekolah dasar saran atas pemenuhan sarana dan prasarana dapat dipenuhi dengan baik oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, karena sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting diperhatikan karena guru dan siswa pasti ingin tempat dan suasana belajar yang kondusif karena proses pembelajaran akan berlangsung lama.

Untuk indikator ini diperkuat lagi dari hasil wawancara peneliti kepada kepala Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, beliau mengatakan pihak dinas dalam memenuhi permintaan sekolah terlebih dahulunya mereka meninjau langsung ke sekolah dalam memperhatikan sarana dan prasarana sekolah dapat mana yang perlu ditambah akan dipenuhi dan pendataan sarana dan prasarana ini berjalan dengan cukup baik, sehingga keluhan-keluhan dan saran yang diterima dari beberapa kepala sekolah dapat terselesaikan dengan baik dan signifikan terjadi perubahan yang lebih baik, di sekolah tersebut.

Selanjutnya untuk menilai hasil responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dari data dapat dilihat bahwa hasil jawaban responden berdasarkan kuisioner yang telah penulis sebarakan untuk menilai bahwa Evaluasi Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dapat dinilai sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten

Bungo dinilai sangat baik berjumlah 29 dengan rata-rata 10 dengan persentase 17 %.

2. Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dinilai baik berjumlah 53 dengan rata-rata 18 dengan persentase 30 %.
3. Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dinilai cukup baik berjumlah 84 dengan rata-rata 28 dengan persentase 46 %.
4. Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dinilai kurang baik berjumlah 14 dengan rata-rata 4 dengan persentase 7 %.

Sehingga dapat dilihat hasil penilaian responden Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dinilai cukup baik berjumlah 84 dengan rata-rata 28 dengan persentase 46 %. Dengan dasar penilaian tersebut dan berdasarkan pengainatan langsung yang dilakukan oleh penulis serta berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa Kepala Sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan bahwa Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo dinilai cukup baik dalam menjalankan tugasnya sehingga ada hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapatlah disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi berada pada garis cukup baik namun perlu

ditingkatkan lagi terutama pada pedoman kerja. Kondisi ini disebabkan oleh :

1. Faktor *Skill* / Keterampilan yang dimiliki oleh pegawai. Dimana dapat dilihat bahwa masih terdapat kurangnya keterampilan pegawai yang ada di Kecamatan Rantau Pandan dalam menggunakan kelengkapan elektronik seperti komputer yang digunakan dalam menulis data yang akan digunakan dalam memberikan laporan kepada pihak UPT. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyelesaian tugas. Disamping itu penyelesaian tugas yang membutuhkan tingkat kebutuhan yang mendadak tidak dapat diselesaikan dengan segera karena disebabkan pegawai yang akan menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan komputer tidak berada di tempat.

Faktor Disiplin Pegawai. Dimana melihat kondisi pegawai masih ditemukan pegawai yang mengindahkan disiplin yang telah ditetapkan. sehingga akan berdampak kepada pelayanan kebutuhan masyarakat yang akan menimbulkan opini bahwa tingkat pemahaman dan pelayanan tidak berjalan dengan baik. Sehingga untuk mendapatkan pelaksanaan tugas yang cepat, belum dapat berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Surya. 2009. *Manajemen Kinerja*. Filsafah Teori dan Penerapannya. Yogyakarta; Pustaka Belajar.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University.
- Effendy, Mochtar. 1996. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta. Bharatara.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Garduso Gomes, Faustini. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Andy Yogyakarta.
- Hasibuan, malayu S.P. 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadi Nawawi, 2001, *Perencanaan Sumber Daya Manusia Untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*. Yogyakarta. Gajah Mada University.



- Handoko, T. Hani, 1996. “*Manajemen Personalias dan Sumber Daya Manusia*”, BPF, Yogyakarta.
- Hariandja, Marihot TE. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Ibrahim, 1980. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gunung Agung.
- Indrastuti, Sri. Amries Ruslan Tanjung. 2008. *Peran Budaya organisasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Kerja, dan Kinerja Pegawai Serta Kualitas Pelayanan* (Secara Teoritis dan Empiris) Pekanbaru-Riau. UIR Prees.
- Kaho, Josef R. dan Haryanto.1998. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Komaruddin, 1999, “*Organisasi dan Manajemen*”, Jakarta. LP3ES
- Moenir, 1997. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Moekijat, 1989. *Dasar-Dasar Motivasi*. Alumni Bandung.
- Muntadi, Sidarta. 1982. *Dasar Pembinaan Tertib Administrasi*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidji. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nurmasyah, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Pekanbaru, Unilak Prees.
- Ruky. Achmad S. 2006. “ *Sistem Manajemen Kinerja (Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima)*” PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. ANDI OFFSET. Yogyakarta.

**Dokumentasi:**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Pedoman Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Keputusan Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Pandan Nomor : Kpts / 340/UPT. Diknas-RT/248 Tentang Penetapan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT), KA. Subbag Tata usaha, Pengawas, Penilik dan Staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) DIKNAS Kecamatan Rantau Pandan.